



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 3849-3857

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Manajemen Konflik Kebijakan Publik dalam Perspektif SDG 16: Analisis Respons Masyarakat terhadap Kebijakan Subsidi BBM di Indonesia

Navy Restiani Anggita Nurlaila, Rosalia Triana Dewi, Clara Aurora Salsabila, Perdy Alfa Resal, Ravienda Anita Fitrie, Nuh Krama Hadianto

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
24040674301@mhs.unesa.ac.id, 24040674296@mhs.unesa.ac.id, 24040674324@mhs.unesa.ac.id,
24040674334@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia merupakan salah satu kebijakan publik yang sering menimbulkan konflik sosial karena berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk konflik, faktor penyebab konflik, serta respons masyarakat terhadap kebijakan subsidi BBM dalam perspektif manajemen konflik dan Sustainable Development Goals (SDG) 16. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pengkajian berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan artikel berita yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik subsidi BBM tidak hanya dipicu oleh kenaikan harga, tetapi juga disebabkan oleh distribusi subsidi yang tidak tepat sasaran, lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi, serta kurang optimalnya komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Respons masyarakat terhadap kebijakan subsidi BBM ditunjukkan melalui demonstrasi, kritik di media sosial, hingga perubahan pola konsumsi energi. Pemerintah telah melakukan berbagai strategi manajemen konflik, seperti pemberian bantuan sosial, digitalisasi distribusi BBM, dan komunikasi publik, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala sehingga konflik serupa terus berulang. Dalam perspektif SDG 16, pengelolaan konflik kebijakan subsidi BBM memerlukan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, transparan, partisipatif, dan responsif agar tercipta stabilitas sosial serta penguatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem distribusi subsidi, penguatan pengawasan, serta peningkatan komunikasi publik agar kebijakan subsidi BBM dapat diterapkan secara lebih efektif dan minim konflik sosial.

Kata kunci: Subsidi BBM, Manajemen Konflik, Respons Masyarakat, Kebijakan Publik, SDG 16.

1. Latar Belakang

Kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia merupakan salah satu kebijakan publik yang paling sering memicu konflik antara pemerintah dan masyarakat. Sejak era awal kemerdekaan hingga pemerintahan modern, penyesuaian harga BBM terus dilakukan sebagai respons terhadap dinamika harga minyak dunia dan tekanan fiskal negara (Kementerian ESDM, 2022). Dalam praktiknya, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memunculkan persoalan sosial dan politik yang kompleks. Sejarah menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM hampir selalu diikuti oleh berbagai bentuk respons masyarakat. Pada masa krisis ekonomi 1997–1998, kebijakan penyesuaian harga BBM berkontribusi terhadap meningkatnya ketidakstabilan sosial dan gelombang demonstrasi besar (Basri, 2013). Hal serupa juga terjadi pada periode reformasi, terutama pada tahun 2005, 2008, dan 2013, ketika kebijakan kenaikan BBM memicu protes luas dari mahasiswa, buruh, dan kelompok masyarakat lainnya (Widodo, 2015). Bahkan pada tahun 2022, kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi kembali menimbulkan penolakan publik yang signifikan, disertai aksi demonstrasi di berbagai daerah (CNN Indonesia, 2022). Pola yang berulang ini menunjukkan bahwa kebijakan BBM memiliki sensitivitas tinggi terhadap kondisi sosial masyarakat.

Fenomena tersebut menegaskan bahwa kebijakan subsidi BBM tidak hanya merupakan persoalan ekonomi, melainkan juga menjadi sumber konflik publik yang berulang. Konflik muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah yang berupaya menjaga stabilitas anggaran negara dan masyarakat yang terdampak langsung oleh kenaikan harga. Dampak yang ditimbulkan bersifat multidimensional, mulai dari inflasi, penurunan daya beli masyarakat, hingga meningkatnya ketegangan sosial dan politik (Suryahadi et al.,

2012). Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana respons masyarakat terbentuk terhadap kebijakan tersebut. Analisis ini dapat dijelaskan melalui teori respon, yang memandang bahwa reaksi individu maupun kelompok terhadap suatu kebijakan dipengaruhi oleh persepsi, pengalaman, serta kondisi sosial-ekonomi yang mereka hadapi (Rakhmat, 2011). Respons tersebut dapat berupa penerimaan, penolakan, maupun sikap ambivalen yang kemudian termanifestasi dalam berbagai tindakan sosial, seperti demonstrasi, kritik di media, maupun bentuk partisipasi lainnya.

Lebih lanjut, kajian ini juga relevan dikaitkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions) yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang inklusif, responsif, serta mampu mengelola konflik secara efektif (United Nations, 2015). Dalam perspektif ini, konflik akibat kebijakan subsidi BBM tidak hanya perlu dipahami, tetapi juga harus dikelola melalui pendekatan manajemen konflik yang konstruktif agar tidak berkembang menjadi instabilitas sosial yang lebih luas. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons masyarakat terhadap kebijakan subsidi BBM di Indonesia dari waktu ke waktu serta mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik yang muncul sebagai dampak dari kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengkaji respons masyarakat dengan menggunakan teori respon sebagai pisau analisis, sekaligus menempatkan kebijakan subsidi BBM dalam perspektif SDG 16 yang menekankan pentingnya pengelolaan konflik dan penguatan institusi yang responsif.

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam memperkaya kajian kebijakan publik, khususnya terkait analisis respons masyarakat dan manajemen konflik. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan subsidi BBM yang lebih adaptif, adil, dan minim konflik sosial. Selain itu, secara akademis penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti dalam mengkaji isu kebijakan publik, konflik sosial, serta implementasi SDGs di Indonesia.

Kajian mengenai kebijakan subsidi BBM menjadi semakin penting karena kebijakan ini berada pada titik temu antara kepentingan ekonomi negara dan kebutuhan dasar masyarakat. Bagi pemerintah, subsidi BBM sering dipandang sebagai instrumen untuk menjaga keterjangkauan energi, mengendalikan beban biaya transportasi, serta melindungi kelompok masyarakat tertentu dari gejolak harga energi. Namun, di sisi lain, subsidi yang terlalu besar juga dapat membebani anggaran negara dan mengurangi ruang fiskal untuk sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Ketegangan antara kebutuhan menjaga stabilitas fiskal dan kewajiban melindungi masyarakat inilah yang membuat kebijakan subsidi BBM selalu menempati posisi sensitif dalam perumusan kebijakan publik.

Dalam perspektif kebijakan publik, subsidi BBM tidak dapat hanya dilihat sebagai keputusan teknokratis yang berbasis perhitungan anggaran. Kebijakan ini juga menyangkut persepsi keadilan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta kemampuan negara dalam menjelaskan alasan kebijakan kepada publik. Masyarakat sering kali menilai kebijakan kenaikan atau penyesuaian harga BBM dari dampak langsung yang mereka rasakan, seperti kenaikan ongkos transportasi, harga kebutuhan pokok, dan biaya produksi usaha kecil. Ketika masyarakat merasa bahwa kebijakan tersebut tidak disertai perlindungan yang memadai, respons penolakan menjadi lebih mudah muncul. Oleh karena itu, konflik dalam kebijakan subsidi BBM bukan sekadar akibat dari perubahan harga, melainkan juga akibat dari lemahnya komunikasi, rendahnya partisipasi publik, dan belum meratanya rasa keadilan dalam distribusi dampak kebijakan.

Respons masyarakat terhadap kebijakan subsidi BBM juga dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi sosial atas tekanan ekonomi yang dirasakan. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah cenderung lebih rentan terhadap perubahan harga BBM karena sebagian besar pengeluaran mereka digunakan untuk kebutuhan pokok dan mobilitas harian. Kenaikan harga BBM dapat menimbulkan efek berantai terhadap harga barang dan jasa, sehingga beban yang dirasakan masyarakat menjadi lebih luas daripada sekadar biaya bahan bakar. Dalam situasi seperti ini, demonstrasi, kritik publik, dan perdebatan di media sosial dapat dipahami sebagai saluran aspirasi masyarakat untuk menuntut kejelasan, perlindungan, dan keadilan. Artinya, konflik yang muncul tidak selalu harus dipandang sebagai ancaman, tetapi juga sebagai sinyal bahwa terdapat kebutuhan publik yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam proses kebijakan.

Namun, apabila konflik tidak dikelola dengan baik, respons masyarakat dapat berkembang menjadi ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah. Ketidakpercayaan ini muncul ketika masyarakat merasa bahwa

kebijakan dibuat secara sepihak, tidak transparan, atau tidak mempertimbangkan kondisi riil masyarakat. Dalam banyak kasus, persoalan utama bukan hanya pada substansi kebijakan, tetapi pada proses perumusan dan penyampaian. Kebijakan yang secara ekonomi dianggap rasional dapat tetap ditolak apabila publik tidak memahami dasar pertimbangannya atau merasa tidak dilibatkan. Oleh sebab itu, manajemen konflik menjadi aspek penting dalam kebijakan subsidi BBM. Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme dialog, konsultasi publik, penyampaian informasi yang jelas, serta kebijakan kompensasi yang tepat sasaran untuk mengurangi potensi ketegangan sosial.

Dalam kerangka SDG 16, pengelolaan konflik kebijakan subsidi BBM berkaitan erat dengan prinsip institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif. SDG 16 menekankan bahwa perdamaian sosial tidak hanya berarti ketiadaan kekerasan, tetapi juga adanya tata kelola yang mampu merespons kebutuhan warga secara adil dan terbuka. Jika kebijakan BBM menimbulkan konflik berulang, maka hal tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas institusi dalam membaca aspirasi masyarakat, menyusun kebijakan berbasis bukti, serta membangun komunikasi publik yang lebih partisipatif. Dengan kata lain, keberhasilan kebijakan subsidi BBM tidak hanya diukur dari efisiensi anggaran, tetapi juga dari sejauh mana proses kebijakan mampu menjaga kepercayaan publik dan mencegah konflik sosial yang lebih besar.

Manajemen konflik dalam kebijakan subsidi BBM dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan preventif, yaitu mengidentifikasi sejak awal kelompok masyarakat yang paling terdampak dan menyiapkan skema perlindungan sebelum kebijakan diterapkan. Kedua, pendekatan komunikatif, yaitu menjelaskan tujuan, alasan, dan manfaat kebijakan secara terbuka agar masyarakat tidak hanya menerima keputusan sebagai beban, tetapi memahami konteks yang melatarbelakanginya. Ketiga, pendekatan partisipatif, yaitu membuka ruang bagi masyarakat, akademisi, organisasi buruh, mahasiswa, pelaku usaha kecil, dan kelompok sipil untuk menyampaikan masukan. Keempat, pendekatan korektif, yaitu melakukan evaluasi apabila kebijakan menimbulkan dampak yang tidak sesuai dengan tujuan awal. Keempat pendekatan tersebut penting agar konflik tidak hanya diredam secara sementara, tetapi dikelola secara konstruktif.

Selain itu, kebijakan subsidi BBM perlu diarahkan pada prinsip keadilan sosial. Subsidi yang tidak tepat sasaran dapat menimbulkan persoalan baru karena manfaatnya tidak selalu dinikmati oleh kelompok yang paling membutuhkan. Ketika masyarakat melihat adanya ketimpangan dalam penerimaan manfaat subsidi, rasa ketidakadilan akan semakin kuat. Oleh karena itu, reformasi subsidi perlu dilakukan dengan hati-hati, bertahap, dan disertai data yang akurat. Pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok rentan memperoleh perlindungan melalui bantuan sosial, subsidi transportasi, atau program kompensasi lain yang benar-benar menjawab kebutuhan mereka. Dengan demikian, konflik dapat dikurangi karena masyarakat melihat adanya tanggung jawab negara dalam melindungi warga yang terdampak.

Dalam konteks akademik, penelitian mengenai respons masyarakat terhadap kebijakan subsidi BBM penting karena dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara negara dan warga dalam proses kebijakan publik. Respons masyarakat tidak boleh hanya dipahami sebagai penolakan emosional, tetapi sebagai bentuk komunikasi politik dan sosial yang mencerminkan persepsi, pengalaman, serta harapan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui teori respon, penelitian ini dapat mengkaji bagaimana masyarakat menafsirkan kebijakan subsidi BBM, faktor apa saja yang memengaruhi reaksi mereka, serta bagaimana respons tersebut berkembang menjadi konflik atau dukungan. Analisis ini penting untuk memahami bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada penerimaan sosial, bukan hanya pada ketepatan perhitungan ekonomi.

Dengan demikian, kebijakan subsidi BBM di Indonesia perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai persoalan ekonomi, sosial, politik, dan tata kelola pemerintahan. Konflik yang muncul akibat kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu memperkuat strategi manajemen konflik yang sejalan dengan prinsip SDG 16. Pemerintah tidak cukup hanya menetapkan kebijakan, tetapi juga harus membangun kepercayaan, membuka ruang partisipasi, menjamin transparansi, dan memastikan perlindungan bagi kelompok terdampak. Apabila hal tersebut dilakukan, kebijakan subsidi BBM tidak hanya menjadi instrumen pengelolaan energi dan fiskal, tetapi juga menjadi sarana memperkuat institusi yang responsif, inklusif, dan berkeadilan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai pentingnya mengelola konflik kebijakan secara konstruktif, sehingga kebijakan publik dapat berjalan lebih efektif tanpa mengabaikan stabilitas sosial dan kepentingan masyarakat luas. Dengan pemahaman tersebut, analisis kebijakan subsidi BBM dapat menjadi dasar untuk merumuskan model pengambilan keputusan yang lebih manusiawi, dialogis, peka terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia yang beragam, serta berkelanjutan dalam jangka panjang untuk masa depan bersama.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode studi literatur dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan kebijakan subsidi BBM, respons masyarakat, konflik kebijakan publik, serta perspektif SDG 16. Menurut Sugiyono, studi literatur merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel berita, laporan pemerintah, serta dokumen resmi yang membahas kebijakan subsidi BBM di Indonesia. Data sekunder tersebut digunakan untuk memahami dinamika konflik yang muncul akibat kebijakan subsidi BBM dan bentuk respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut dari waktu ke waktu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan analisis terhadap sumber-sumber yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini juga menggunakan teori respon sebagai landasan analisis untuk melihat bentuk penerimaan maupun penolakan masyarakat terhadap kebijakan subsidi BBM. Selain itu, konsep manajemen konflik dan SDG 16 digunakan untuk menelaah bagaimana konflik kebijakan publik dapat dikelola melalui tata kelola pemerintahan yang responsif dan inklusif. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dengan cara menguraikan, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai temuan dari sumber literatur yang telah dikumpulkan. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan subsidi BBM, respons masyarakat, konflik sosial, serta relevansinya terhadap tujuan SDG 16.

3. Hasil dan Diskusi

Bentuk Konflik dalam Kebijakan Subsidi BBM

Berdasarkan kajian konflik dalam kebijakan subsidi BBM di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai reaksi terhadap kenaikan harga. Konflik ini muncul memiliki dimensi yang lebih kompleks, terutama dalam aspek distribusi, pengawasan, dan tata kelola kebijakan. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa permasalahan utama subsidi BBM terletak pada adanya ketidaktepatan sasaran dan lemahnya dalam pengawasan distribusi. Dari kondisi ini menyebabkan terbukanya peluang untuk terjadinya penyimpangan di lapangan, sehingga BBM subsidi tidak dinikmati sepenuhnya oleh kelompok yang berhak menikmati (Dartanto, 2013). Dengan itu dapat dilihat bahwa konflik tidak selalu dipicu oleh kebijakan baru, tapi juga dapat dipicu oleh permasalahan lama yang belum terselesaikan.

Dalam implementasinya konflik juga muncul karena adanya ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan kondisi realnya di lapangan. Upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem yang distribusi yang subsidi melalui digitalisasi dengan menggunakan barcode atau QR code, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan ketepatan dalam distribusi subsidi. Tetapi kebijakan tersebut malah memicu resistensi dari kelompok tertentu, seperti sopir truk, yang merasa bahwa dengan kebijakan tersebut membuat akses terhadap BBM subsidi menjadi lebih terbatas.

Dengan itu dapat dilihat bahwa konflik tidak hanya terjadi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga bisa antara desain kebijakan dan kenyataan implementasinya. Konflik ini juga berkembang menjadi konflik horizontal di dalam masyarakat. Terkait persepsi ketidakadilan dalam distribusi subsidi, karena subsidi BBM dianggap tidak tepat sasaran dan lebih sering dinikmati oleh kelompok mampu, maka akan muncul adanya ketidakpuasan dari mereka kelompok yang seharusnya berhak menikmati BBM subsidi. (Beaton & Lontoh, 2010). Dengan demikian konflik subsidi BBM bisa dikategorikan sebagai konflik yang struktural, karena berkaitan dengan sistem distribusi, sistem pengawasan, serta tata kelola kebijakan. Pola pada konflik ini cenderung berulang meskipun bentuknya terus berkembang.

Faktor Penyebab Konflik

Konflik dalam kebijakan subsidi BBM terdiri dari berbagai faktor penyebab yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor yang biasanya sering muncul adalah faktor ekonomi, khususnya seperti kenaikan harga BBM yang bisa berdampak langsung pada inflasi. Kenaikan itu dapat meningkatkan biaya transportasi dan distribusi barang, kemudian mengakibatkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan akhirnya menurunkan daya beli di masyarakat (Dartanto, 2013).

Faktor ekonomi bukanlah satu-satunya penyebab konflik subsidi BBM. Permasalahan pada distribusi subsidi yang tidak tepat sasaran ke masyarakat yang seharusnya menikmati subsidi BBM menjadi faktor lain dalam konflik ini. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa subsidi energi di Indonesia masih banyak dinikmati oleh kelompok mampu, sehingga menimbulkan persepsi ketidakadilan (Beaton dan Lontoh, 2010).

Pada implementasi kebijakannya juga merupakan faktor terjadinya konflik. Kebijakan yang secara konsep yang seharusnya dirancang untuk memperbaiki sistem dengan pembatasan atau digitalisasi distribusi, seringkali memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Dengan itu menyebabkan munculnya ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirancang pemerintah dan kondisi riil di lapangan, sebagaimana dapat dilihat pada protes sopir truk terkait kebijakan barcode BBM subsidi di Indonesia .

Faktor transparansi dan kepercayaan publik juga merupakan faktor penting juga. Dalam kajian kebijakan publik, rendahnya transparansi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan memperbesar potensi konflik kebijakan. Berbagai studi menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap kebijakan dipengaruhi oleh persepsi keadilan dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga dapat memunculkan reaksi penolakan dan ketidakpuasan (Resosudarmo et al., 2013).

Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Subsidi BBM

Respon masyarakat terhadap kebijakan subsidi sangatlah beragam dan konsisten setiap kali adanya perubahan kebijakan, respon yang paling sering terlihat di masyarakat adalah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh, dan kelompok pekerja sektor transportasi. Aksi protes yang dilakukan oleh sopir truk di Jawa timur terhadap kebijakan barcode BBM subsidi adalah salah satu contoh respon masyarakat terhadap kebijakan subsidi BBM.

Selain aksi demonstrasi respon masyarakat juga berkembang di ruang digital. Media sosial menjadi salah satu sarana utama dalam menyampaikan kritik, opini, dan tempat diskusi terkait kebijakan BBM. Tingginya intensitas percakapan publik menunjukkan bahwa masyarakat sekarang semakin aktif dan kritis dalam merespon kebijakan pemerintah (Resosudarmo et al., 2013).

Terdapat juga respon yang adaptif, seperti adanya pola perubahan konsumsi energi dan pengurangan penggunaan kendaraan, respon ini menunjukkan adanya dampak langsung kebijakan terhadap kehidupan masyarakat. muncul pula respon yang bersifat kritis, dalam bentuk tuntutan transparansi dan akuntabilitas anggaran subsidi. menunjukkan bahwa masyarakat mulai mengevaluasi kebijakan secara lebih mendalam.

Strategi Pemerintah dalam Manajemen Konflik

Dalam menghadapi konflik, pemerintah telah menerapkan berbagai strategi agar dapat meredam dampak yang ditimbulkan. Salah satu strateginya dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sebagai bentuk kompensasi kepada masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan (Kementerian Keuangan, 2026).

Selain itu, pemerintah juga menerapkan strategi preventif yakni dengan menahan kenaikan harga BBM subsidi agar menjaga stabilitas sosial. Kebijakan ini adalah upaya untuk mencegah konflik sebelum berkembang lebih luas, meskipun strategi ini dapat meningkatkan beban anggaran negara.

Pemerintah juga sudah berupaya melakukan perbaikan melalui digitalisasi distribusi BBM, seperti penggunaan sistem barcode atau QR code. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah meningkatkan transparansi dan memastikan subsidi tepat sasaran. tapi dalam praktiknya kebijakan ini masih menghadapi kendala yakni dalam implementasi di lapangan.

pemerintah juga melakukan komunikasi ke pada publik untuk menjelaskan kebijakan yang diambil. Tetapi komunikasinya masih cenderung bersifat satu arah dan belum sepenuhnya melibatkan partisipasi dari masyarakat.

Strategi pemerintah dalam manajemen konflik subsidi BBM mencakup pendekatan kompensasi, preventif, struktural, dan komunikasi. Meskipun demikian, sebagian besar strategi tersebut masih menunjukkan

kecenderungan reaktif, yaitu baru diperkuat setelah konflik muncul. Dengan itu menunjukkan bahwa manajemen konflik kebijakan masih harus diperkuat agar lebih bersifat preventif dan partisipatif.

Analisis Efektivitas Manajemen Konflik

Manajemen konflik dalam kebijakan subsidi BBM di Indonesia dapat dilakukan belum berjalan secara optimal karena konflik yang sama terus muncul setiap kali pemerintah melakukan penyesuaian harga. Pemerintah memang telah menerapkan beberapa langkah, seperti pemberian bantuan sosial, subsidi langsung, hingga pengawasan distribusi BBM. Akan tetapi, langkah tersebut lebih banyak bersifat sementara dan belum mampu menyelesaikan persoalan utama, yaitu ketimpangan distribusi subsidi dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Efektivitas manajemen konflik juga dipengaruhi oleh cara pemerintah menyampaikan kebijakn kepada masyarakat. Dalam beberapa kasus, kebijakan kenaikan harga BBM dianggap dilakukan tanpa sosialisasi yang cukup sehingga masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut memunculkan persepsi bahwa pemerintah kurang memahami situasi ekonomi masyarakat kecil yang paling terdampak oleh kenaikan harga. Akibatnya, penolakan publik sering diwujudkan dalam bentuk demonstrasi, kritik di media sosial hingga aksi protes dari kelompok pekerja transportasi dan buruh.

Selain itu, implementasi kebijakan di lapangan masih menghadapi banyak kendala, terutama dalam pengawasan distribusi BBM subsidi. Progam digitalisasi melalui barcode atau QR code memang bertujuan memperbaiki ketepatan sasaran, tetapi pada praktiknya masih menimbulkan kesulitan bagi sebagian masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang baik secara konsep belum tentu berjalan efektif apabila tidak disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat di lapangan. Dengan demikian, efektifitas manajemen konflik tidak hanya bergantung pada kebijakan ekonomi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah memabngun komunikasi, transportasi, dan rasa keadilan sosial di tengah masyarakat.

Kebijakan Subsidi BBM dalam Perspektif SDG 16

Dalam perspektif SDG 16, kebijakan subsidi BBM berkaitan erat dengan upaya menciptakan perdamaian sosial, keadilan, dan institusi pemerintahan yang kuat secara responsif. SDG 16 menekankan pentingnya tata kelola yang inklusif dan mampu mengelola konflik secara damai agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan subsidi BBM tidak hanya dipandang sebagai kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari pengelolaan stabilitas sosial dan politik negara.

Konflik yang muncul akibat kebijakan BBM meunjukkan bahwa pemerintah masih menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan publik. Ketika masyarakat merasa kebijakan tidak adil atau tidak tepat sasaran, maka potensi konflik akan semakin besar. dalam konteks ini, prinsip SDG 16 menekankan pentingnya keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, dan penguatan lembaga publik agar kebijakan yang dibuat lebih diterima masyarakat.

Penerapan prinsip SDG 16 dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan subsidi, memperkuat pengawasan distribusi BBM, serta membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, konflik tidak hanya dapat ditekan, tetapi juga dapat diubah menjadi proses partisipasi publik yang lebih sehat dalam kebijakan negara.

Solusi dan Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengurangi konflik dalam kebijakan subsidi BBM, pemerintah perlu memperbaiki sistem pendataan penerimaan subsidi agar lebih akurat dan tepat sasaran. Pengguna teknologi digital harus disertai dengan kesiapan infrastruktur dan sosialisasi yang memadai agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mengakses BBM subsidi. Selain itu, pengawasan distribusi perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan subsidi oleh pihak yang tidak berhak.

Pemerintah juga perlu meningkatkan komunikasi publik sebelum kebijakan diterapkan. Penjelasan yang terbuka mengenai alasan kenaikan harga BBM, kondisi anggaran negara, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan membangun kepercayaan publik. Dialog dengan kelompok

masyarakat terdampak juga penting dilakukan agar kebijakan yang diambil lebih mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

Selain itu pemerintah disarankan memperluas bantuan sosial, subsidi transportasi umum, dan program perlindungan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah tersebut dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengurangi dampak sosial akibat kenaikan harga BBM dapat dikelola dengan baik serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip SDG 16.

Diskusi

Hasil kajian menunjukkan bahwa konflik dalam kebijakan subsidi BBM di Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai reaksi spontan terhadap kenaikan harga, melainkan sebagai persoalan kebijakan publik yang memiliki akar struktural. Konflik muncul karena adanya ketegangan antara tujuan pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan tuntutan masyarakat terhadap akses energi yang adil, terjangkau, dan tepat sasaran. Dalam hasil penelitian, konflik tidak hanya terlihat pada saat harga BBM dinaikkan, tetapi juga pada persoalan distribusi, pengawasan, ketepatan sasaran, dan implementasi kebijakan di lapangan. Hal ini memperlihatkan bahwa subsidi BBM merupakan isu yang sangat sensitif karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan ekonomi masyarakat sehari-hari.

Bentuk konflik yang ditemukan menunjukkan adanya dimensi vertikal dan horizontal. Konflik vertikal terlihat dari ketegangan antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai pihak terdampak. Masyarakat sering kali menolak kebijakan karena merasa beban ekonomi akibat penyesuaian harga BBM tidak sebanding dengan perlindungan yang diberikan pemerintah. Sementara itu, konflik horizontal muncul ketika terjadi persepsi ketidakadilan dalam distribusi subsidi. Kelompok masyarakat yang merasa berhak menerima subsidi dapat merasa dirugikan apabila BBM subsidi justru dinikmati oleh kelompok yang lebih mampu. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik subsidi BBM tidak hanya berkaitan dengan harga, tetapi juga dengan rasa keadilan sosial.

Faktor ekonomi menjadi penyebab konflik yang paling mudah terlihat. Kenaikan harga BBM berdampak langsung pada biaya transportasi, distribusi barang, dan harga kebutuhan pokok. Dampak berantai tersebut dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Dalam situasi seperti ini, masyarakat menilai kebijakan BBM bukan hanya sebagai keputusan teknis pemerintah, tetapi sebagai kebijakan yang memengaruhi keberlangsungan hidup mereka. Oleh sebab itu, protes publik dapat dipahami sebagai respons terhadap tekanan ekonomi yang dirasakan secara nyata.

Namun, faktor ekonomi bukan satu-satunya penyebab konflik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketidaktepatan sasaran subsidi menjadi persoalan penting. Subsidi yang seharusnya melindungi kelompok rentan masih sering dinilai belum sepenuhnya sampai kepada pihak yang membutuhkan. Ketika masyarakat melihat adanya ketimpangan dalam penerimaan manfaat subsidi, kepercayaan terhadap pemerintah dapat menurun. Persepsi bahwa subsidi lebih banyak dinikmati oleh kelompok mampu menciptakan rasa ketidakadilan dan memperkuat resistensi terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, efektivitas kebijakan subsidi sangat bergantung pada akurasi data, pengawasan distribusi, dan kejelasan mekanisme penerimaan subsidi.

Dari sisi implementasi, kebijakan digitalisasi distribusi BBM melalui barcode atau QR code menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola subsidi. Secara konsep, digitalisasi bertujuan meningkatkan transparansi, mengurangi penyalahgunaan, dan memastikan subsidi lebih tepat sasaran. Akan tetapi, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan ini juga menimbulkan resistensi dari kelompok tertentu, seperti sopir truk, karena dianggap membatasi akses terhadap BBM subsidi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang baik secara administratif belum tentu diterima secara sosial apabila tidak disertai sosialisasi, kesiapan infrastruktur, dan pemahaman terhadap kondisi masyarakat di lapangan.

Respons masyarakat terhadap kebijakan subsidi BBM juga berkembang dalam berbagai bentuk. Demonstrasi masih menjadi bentuk respons yang paling nyata, terutama dari mahasiswa, buruh, dan pekerja sektor transportasi. Aksi ini menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan ruang publik untuk menyampaikan keberatan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan. Selain demonstrasi, respons masyarakat juga muncul melalui media sosial. Ruang digital menjadi tempat penyampaian kritik, opini, dan diskusi publik mengenai

kebijakan BBM. Fenomena ini memperlihatkan bahwa masyarakat semakin aktif mengawasi kebijakan pemerintah dan tidak lagi hanya menjadi penerima pasif keputusan negara.

Selain respons penolakan, terdapat pula respons adaptif dalam masyarakat. Sebagian masyarakat menyesuaikan pola konsumsi energi, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, atau mencari alternatif transportasi. Respons ini menunjukkan bahwa kebijakan BBM memengaruhi perilaku sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, adaptasi tersebut tidak selalu berarti penerimaan penuh terhadap kebijakan. Dalam banyak kasus, adaptasi dilakukan karena masyarakat tidak memiliki pilihan lain. Oleh karena itu, pemerintah perlu memahami bahwa diamnya sebagian masyarakat tidak selalu mencerminkan persetujuan, melainkan bisa menjadi bentuk keterpaksaan menghadapi perubahan kebijakan.

Strategi pemerintah dalam mengelola konflik telah dilakukan melalui beberapa pendekatan, seperti pemberian bantuan sosial, penahanan harga BBM subsidi, digitalisasi distribusi, dan komunikasi publik. Bantuan sosial berfungsi sebagai kompensasi agar kelompok rentan tetap memiliki daya beli. Penahanan harga dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah gejolak sosial yang lebih besar. Digitalisasi diarahkan untuk memperbaiki distribusi, sedangkan komunikasi publik digunakan untuk menjelaskan alasan kebijakan. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi tersebut masih cenderung reaktif. Pemerintah sering kali memperkuat langkah penanganan setelah konflik muncul, bukan sebelum konflik berkembang.

Efektivitas manajemen konflik dalam kebijakan subsidi BBM masih perlu ditingkatkan. Konflik yang terus berulang setiap kali terjadi perubahan kebijakan menunjukkan bahwa akar masalah belum sepenuhnya diselesaikan. Persoalan ketimpangan distribusi, rendahnya kepercayaan publik, lemahnya sosialisasi, dan terbatasnya partisipasi masyarakat masih menjadi kendala utama. Pemerintah perlu mengubah pendekatan dari sekadar meredam konflik menjadi membangun sistem pencegahan konflik. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi yang lebih terbuka, dialog dengan kelompok terdampak, serta evaluasi kebijakan berbasis kondisi riil masyarakat.

Dalam perspektif SDG 16, konflik subsidi BBM berkaitan erat dengan prinsip perdamaian, keadilan, dan penguatan institusi. SDG 16 menekankan pentingnya tata kelola yang inklusif, transparan, dan responsif. Oleh karena itu, kebijakan subsidi BBM tidak cukup hanya dinilai dari efisiensi anggaran, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan publik dan mencegah konflik sosial. Ketika masyarakat merasa dilibatkan, memperoleh informasi yang jelas, dan melihat adanya keadilan distribusi, maka potensi konflik dapat berkurang. Sebaliknya, kebijakan yang dianggap tertutup dan tidak adil akan memperbesar resistensi sosial.

Berdasarkan pembahasan tersebut, solusi kebijakan perlu diarahkan pada perbaikan data penerima subsidi, penguatan pengawasan distribusi, peningkatan komunikasi publik, dan perlindungan kelompok rentan. Penggunaan teknologi digital harus disertai kesiapan infrastruktur serta pendampingan agar tidak menimbulkan hambatan baru. Pemerintah juga perlu membuka ruang dialog dengan masyarakat sebelum kebijakan diterapkan. Dengan pendekatan yang lebih partisipatif, konflik kebijakan subsidi BBM dapat dikelola secara konstruktif. Kebijakan subsidi BBM seharusnya tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga sarana memperkuat tata kelola pemerintahan yang adil, responsif, dan sesuai dengan nilai SDG 16.

Dengan demikian, diskusi ini menegaskan bahwa konflik subsidi BBM merupakan konsekuensi dari hubungan yang belum seimbang antara desain kebijakan, kapasitas implementasi, dan penerimaan masyarakat. Kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar harus dirancang bukan hanya berdasarkan pertimbangan fiskal, tetapi juga berdasarkan sensitivitas sosial. Jika pemerintah mampu mengelola ketiga aspek tersebut, maka konflik dapat menjadi masukan perbaikan, bukan ancaman bagi stabilitas nasional secara berkelanjutan, demokratis, dan berpihak pada kepentingan publik secara luas. Indonesia di masa depan.

4. Kesimpulan

Kebijakan subsidi BBM di Indonesia merupakan kebijakan publik yang memiliki dampak luas terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik masyarakat. Berdasarkan hasil kajian, konflik yang muncul akibat kebijakan subsidi BBM tidak hanya disebabkan oleh kenaikan harga, tetapi juga dipengaruhi oleh masalah distribusi subsidi yang tidak tepat sasaran, lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi, serta kurang optimalnya komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Konflik tersebut sering kali memunculkan berbagai bentuk respons masyarakat, seperti demonstrasi, kritik di media sosial, hingga aksi protes dari kelompok pekerja dan sektor transportasi.

Dalam perspektif manajemen konflik, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti pemberian bantuan sosial, digitalisasi distribusi BBM, serta komunikasi publik terkait kebijakan subsidi. Namun, strategi tersebut masih cenderung bersifat reaktif dan belum sepenuhnya mampu menyelesaikan akar permasalahan konflik. Efektivitas manajemen konflik juga masih terhambat oleh rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan adanya ketidaksesuaian antara desain kebijakan dengan kondisi riil di lapangan. Ditinjau dari perspektif SDG 16, kebijakan subsidi BBM berkaitan erat dengan pentingnya menciptakan tata kelola pemerintahan yang inklusif, transparan, dan responsif. Oleh karena itu, pengelolaan konflik dalam kebijakan subsidi BBM perlu dilakukan secara lebih partisipatif agar mampu menciptakan stabilitas sosial, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung terciptanya institusi yang kuat dan berkeadilan dalam pembangunan berkelanjutan.

Referensi

1. Basri, M. C. (2013). *A tale of two crises: Indonesia's political economy*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
2. Basri Faisal. (2013). *Perekonomian Indonesia dan tantangan kebijakan energi*. Jakarta: Rajawali Pers.
3. Beaton, C., & Lonton, L. (2010). *Lessons learned from Indonesia's attempts to reform fossil-fuel subsidies*. International Institute for Sustainable Development.
4. CNN Indonesia. (2022). Dampak kenaikan harga BBM dan gelombang demonstrasi masyarakat. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com>
5. CNN Indonesia. (2022). Demonstrasi penolakan kenaikan BBM terjadi di berbagai daerah. Diakses dari CNN Indonesia
6. Dartanto, T. (2017). Fuel subsidy reforms: Lessons learned from Indonesia's experiences. *Asia-Pacific Social Science Review*, 17(1), 13.
7. Detik.com. (2026). Demo sopir truk di Surabaya menuntut hapus barcode, keluarkan kuota solar. Diakses dari Detik.com
8. Jalaluddin Rakhmat. (2011). *Psikologi komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
9. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2022). *Kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi*. Jakarta: ESDM.
10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2022). *Perkembangan kebijakan subsidi BBM di Indonesia*. Jakarta: Kementerian ESDM.
11. Radio Republik Indonesia. (2026). Sopir truk Jatim protes aturan barcode BBM subsidi. Diakses dari RRI
12. Rakhmat, J. (2011). *Psikologi komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
13. Resosudarmo, B. P., Rezki, J. F., & Effendi, Y. (2023). Prospects of energy transition in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(2), 149–177.
14. Sa'diyah, S. S., Saepudin, E. A., Cahya, R., Rosita, S. L., & Ayun, N. Q. (2025). Kebijakan Subsidi BBM. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 286–293.
15. Suara Surabaya. (2026). Protes syarat barcode pembelian BBM, ratusan sopir truk Jatim blokade jalan Jagir Wonokromo. Diakses dari Suara Surabaya
16. Suryahadi, A., Sumarto, S., & Pritchett, L. (2012). The evolution of poverty during the crisis in Indonesia. SMERU Research Institute.
17. Suryahadi Asep., et al. (2012). Dampak kenaikan harga BBM terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jakarta: SMERU Research Institute.
18. United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. New York: UN.
19. United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. New York: United Nations.
20. Widodo, T. (2015). Dampak kebijakan subsidi energi terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16(2), 85–102.
21. Widodo Joko. (2015). Konflik sosial dalam kebijakan kenaikan harga BBM di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 45–56.